

Peran Partisipatif Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sitokok-Kota Batam

Riko Riyanda

(riyanda.fisip@gmail.com)

(Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Putra Batam)

Abstract:

The research is aim at describing the implementation of development planing meeting (Musrenbang) in kelurahan Sitokok, Kecamatan Bulang Kota Batam. Beside of, its aim identifiying and inhibiting fighters of society role in planing and conctructing in kelurahan Setokok. The research used qualitative and descriptive approach. There were two kinds of data taken, first is primary data and second is secondary data. In collecting data, the technique used were observation method, interview method, and documentation method, in analyzing data, reduction data technique was used furthurmore, the presenting of result of analysis and verivication and draw the coclussion. The result of analisis showed that the society in development plan meeting in kelurahan setokok ran as societys expectation. How ever, there were some inhibiting factors founds such as the societyss distrust on stakeholder its caused by the socio economic gap in each area. The important of development planing meeting (musrenbang) is to give the chance to society to partipate in democratic way. Therefore the the society aspiration can be sent to disstrict of batam government

Keyword: Role, development plan, participation

Pendahuluan

Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. (Sumaryadi, 2005: 87). Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya

yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

Partisipasi masyarakat (*public participation*) pada tatanan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (*decision-making process*) yang semakin penting di era otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah membawa perubahan besar dalam setiap segmen penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Fenomena menarik dalam kajian penelitian ini adalah pada perencanaan

pembangunan di Kelurahan Sitokok, Kecamatan Bulang Kota Batam, terutama pada akomodasi aspek partisipasi masyarakat. Diantaranya meliputi: mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah (*bottom-up*) yang dilaksanakan mulai dari tingkat RT sampai pada musrenbang kelurahan belum seutuhnya untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan program pembangunan.

Permasalahan lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan, efeknya adalah muncul apatisisme dari masyarakat mengenai perencanaan pembangunan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan belum diketahui dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat. Sehingga pada waktu proses perencanaan tidak ada "*sense*" yang muncul dari masyarakat untuk ikut terlibat di dalamnya. Hal ini disebabkan karena belum ada pemberitahuan secara rinci dari pihak pemerintah kelurahan mengenai bagaimana proses perencanaan pembangunan, apa, bagaimana dan untuk kepentingan apa dan sebagainya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka fokus masalah yang akan dijawab dalam artikel ini adalah Bagaimana gambaran pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan faktor pendukung dan penghambat partisipasi peran partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan di Kelurahan Sitokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam.

Tinjauan Pustaka

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (keikutsertaan). Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Sementara menurut Huraerah (2008: 100), partisipasi warga ialah proses pengambilan keputusan langsung dalam kebijakan publik. Warga berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Menurut *Oakley et al.* sebagaimana dalam *Jim Ife* (2008: 296) menyebutkan ada perbandingan antara partisipasi sebagai cara dan sebagai tujuan, seperti diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1.
Perbandingan Partisipasi Sebagai Cara dan Tujuan

Partisipasi Sebagai Cara	Partisipasi Sebagai Tujuan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berimplikasi pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program. 3. Penekanan pada mencapai tujuan dan tidak terlalu pada aktifitas partisipasi itu sendiri. 4. Lebih umum dalam program-program pemerintah, yang pertimbangan utamanya adalah untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan efisiensi system penyampaian. 5. Partisipasi umumnya jangka pendek. 6. Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berupaya memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti. 2. Berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan. 3. Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekedar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya. 4. Pandangan ini relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintah. Pada prinsipnya LSM setuju dengan pandangan ini. 5. Partisipasi dipandang sebagai suatu proses jangka panjang. 6. Partisipasi sebagai tujuan relatif

Untuk pengembangan partisipasi masyarakat perlu pemahaman dasar mengenai tingkatan partisipasi. Menurut *Cohen* dan *Uphof* dikutip oleh Soetomo (2008: 12) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4 tingkatan yaitu:

- a. Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa: bentuk tenaga, partisipasi

dalam bentuk uang dan partisipasi dalam bentuk harta benda.

- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek yang telah dibangun.
- d. Evaluasi yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta mengawasi, menilai dan secara tidak langsung misalnya dengan memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Partisipasi Masyarakat

Menurut Sutrisno (dalam Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003: 56-57) mengungkapkan beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu; pertama, belum ada satu kesepahaman konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan. Definisi yang berlaku di lingkungan perencana dan pelaksana pembangunan, partisipasi diartikan sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Hambatan kedua adalah reaksi balik yang datang dari masyarakat sebagai akibat dari diberlakukannya ideologi developmentalisme di negara Indonesia. Pengamanan yang ketat terhadap pembangunan menimbulkan reaksi balik dari masyarakat yang merugikan usaha membangkitkan kemauan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tahap Perencanaan Musrenbangkel Setokok

Sebagai wujud pelaksanaan pembangunan yang partisipatif, Pemerintah Kelurahan Sitokok melakukan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (Musrenbangkel) dengan masyarakat Sitokok. Pola perencanaan pembangunan di kelurahan Sitokok bersifat *bottom-up*, artinya memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan. Di Kelurahan Sitokok terbagi atas lima RW, yakni RW Sitokok I, Setokok II, Pulau Akar, Pulau Nipah dan Pulau Panjang. Proses perencanaan pembangunan melalui mekanisme musyawarah pembangunan kelurahan (musrenbangkel) dimulai dari tahap undangan-undangan yang dilakukan oleh kepala lurah untuk membicarakan usulan-usulan apa saja yang akan di rencanakan

untuk pembangunan di Kelurahan Sitokok.

Dalam undangan rapat tersebut setiap warga yang ada di Kelurahan Sitokok baik dari perwakilan dari kepala RW dan Kepala RT masing-masing kelurahan ikut memberikan usulan-usulan dalam pembangunan di kelurahan Sitokok. Tidak hanya warga kepala RW dan Kepala RT yang dilibatkan namun juga datang dari tokoh-tokoh masyarakat/para pemuka masyarakat, dan para perwakilan organisasi dan tokoh-tokoh pemuda di Kelurahan Sitokok.

Dalam musyawarah ini masyarakat cukup aktif dalam memberikan usulan-usulan yang akan di sampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan Sitokok, warga tahu betul apa yang akan dibangun dalam rangka proses percepatan pembangunan di kelurahannya. Karena perencanaannya melibatkan masyarakat maka pelaksana pembangunan dapat dikatakan berjalan sebagaimana mestinya.

Penyebaran informasi memastikan para stakeholder dapat mendukung proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Sitokok. Arus informasi bisa berasal dari pemerintah kepada warganya, seperti melalui undangan resmi. Dari masyarakat ke pemerintah berupa penyediaan berbagai macam data, pendapat atau analisis. Menurut Ramlan Subakti dari penjabaran rangkaian proses perencanaan Musrenbang tentang perencanaan pembangunan partisipasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah partisipasi yang mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan

kebijakan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintah. Sedangkan partisipasi pasif yaitu kegiatan mentaati peraturan/pemerintah. Menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

Bahwasannya dalam proses perencanaan pembangunan yang ada di Kelurahan Sitokok berjalan baik dan sesuai harapan. Dapat dikatakan partisipasi masyarakat di Kelurahan Sitokok ini cukup antusias. Ini membuktikan adanya kepedulian dan kesadaran warga dalam pembangunan, dalam perencanaan misalnya ini dimulai dengan kehadiran warga dalam rapat musrenbangkel (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan), dalam perencanaan tersebut warga aktif dalam mengusulkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan tempat mereka masing-masing.

Apapun keluhan itu, mereka sampaikan dalam musrenbangkel, dan berharap agar pembangunan tersebut segera di implementasikan. Tahapan musrenbangkel itu sendiri dimulai dari melalui surat undangan rapat, berkumpul dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti Kepala RT, RW, LPS, tokoh-tokoh masyarakat lainnya, termasuk perwakilan pemuda dan baru kemudian diadakan rapat musyawarah. Kemudian dilanjutkan musrenbangkel tingkat kecamatan, kemudian tinggal menunggu hasil musyawarah tingkat kota.

Masyarakat di kelurahan Sitokok khususnya Pulau Nipah partisipasinya sangat aktif dan antusias dalam memberikan ide-ide atau usulan-usulan terhadap perencanaan pembangunan, walaupun memang usulan-usulan tersebut masih banyak yang belum terealisasi sepenuhnya, akan tetapi itu tidak mengurangi antusias masyarakat RT

Pulau Nipah ini untuk terlibat aktif dalam memberikan usulan. Masyarakat Pulau akar di sini antusias dalam memberikan partisipasi dalam memberikan suara terkait perencanaan pembangunan. Hanya saja masih terdapat kendala-kendala dalam tahap pelaksanaannya nanti seperti: tanah yang masih banyak punya pribadi. Jadi untuk mendukung pembangunan mestinya tanah itu dihibahkan.

Partisipasi pada tingkatan awal dalam proses pembangunan ini akan mendorong proses selanjutnya berjalan dengan baik. Karenanya partisipasi menjadi semakin penting karena dipandang sebagai jalur yang paling strategis dalam mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu, program-program yang dirumuskan dan dilaksanakan secara partisipatif turut memberikan kesempatan dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah, partisipasi di masyarakat menjadi kunci sukses dalam pembangunan.

Fakta membuktikan dengan dana yang seadanya partisipasi masyarakat mampu menyelesaikan pekerjaan yang berat dan tidak tergantung dana dari pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Intinya partisipasi masyarakat memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kemajuan di daerah Kelurahan Sitokok meskipun di dalam prakteknya masih terdapat pelaku perubahan yang cenderung memanfaatkan partisipasi sebagai dasar untuk melegalkan kebijakan yang sebetulnya aspirasi masyarakat itu tidak pernah terwakilkan secara keseluruhan. Keterlibatan masyarakat secara langsung kepada masyarakat dalam perencanaan yang menyangkut kesejahteraan mereka telah membuat mereka memetik hasil program pembangunan. Program tersebut

dilakukan secara partisipatif, responsif berkeadilan dan berkelanjutan.

Upaya untuk mendorong berkembangnya kegiatan pembangunan di Kelurahan Sitokok ditempuh melalui kebijakan antara lain penguatan keterkaitan kegiatan pembangunan kawasan kelurahan dan kawasan perkotaan dalam sebuah kesatuan wilayah pengembangan ekonomi lokal, promosi dan pemasaran produk-produk hasil penangkapan ikan, karena di sini pada umumnya masyarakatnya adalah nelayan. Maka di Kelurahan Sitokok diperlukan peningkatan prasarana dan sarana jalan dan kebutuhan nelayan, maka usulan-usulan dalam musrenbang kelurahan seperti, aspal jalan, penerangan jalan, bikin sumur bor, usulan RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni), usulan bikin batu miring/pemecah ombak dan lain sebagainya. Perlu di ketahui setiap usulan tersebut berbeda-beda di setiap RW dan RT masing-masingnya tergantung dari kebutuhan pembangunan di daerahnya.

Potret yang menarik dalam proses musrenbang kelurahan Sitokok adalah bahwa partisipasi mereka tinggal yang dihadiri oleh berbagai macam elemen, masyarakat turun langsung ke lapangan untuk membantu pembangunan yang ada di Sitokok, karena semangat dan kesadaran masyarakatlah yang mendorong besarnya partisipasi mereka. Masalah memang selalu ada, tetapi masyarakat Sitokok menyikapi masalah dengan menagmbil musyawarah dan mufakat. Tujuan dari musyawarah dan mufakat ini untuk mencari solusi agar kedepannya pembangunan berjalan lancar, dan yang membuat tingginya tingkat partisipasi mereka adalah kesadaran bahwa mereka tidak ingin tertinggal dengan masyarakat yang ada di Kota.

1. Tahapan Implementasi Proses Partisipasi

Dalam proses partisipasi warga kelurahan Setokok terjadi beberapa tahap. Tahapannya berupa pembuatan usulan rancangan, pembahasan, dan penetapan.

Dari hasil wawancara terungkap bahwasannya fase partisipasi kelurahan Setokok mengalami perubahan. Keterlibatan masyarakat secara fisik dalam bentuk tenaga dan waktu dalam proses perencanaan pembangunan cukup baik. Dan ini dapat dilihat dari absensi kehadiran rapat yang pada kebanyakan memenuhi undangan dari Lurah Setokok. Dari beberapa rapat yang diadakan pemerintah kelurahan sitokok terlihat antusias masyarakat untuk menghadiri rapat. Sehingga menandakan bahwa masyarakat cukup kompak dan bersatu dalam perencanaan pembangunan.

Sikap apatis itu cenderung tidak diperlihatkan oleh masyarakat Kelurahan Setokok. Apapun program-program yang diajukan oleh pemerintah sepanjang itu memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat Setokok, pada umumnya masyarakat mendukung. Jika aspirasi itu diketahui dan didengarkan, serta ada tampak pula dalam porses pelaksanaannya secara nyata maka itulah yang membuat masyarakat sering kali antusias setiap diadakannya musrenbang kelurahan (Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan) Sitokok.

Dapat diketahui bahwa masukan dari peserta rapat musrenbang kelurahan Sitokok menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi. Pelaksanaan musrenbang kelurahan melibatkan stakeholders Kelurahan yang ada di Setokok. Dimulai dari Lurah Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok

nelayan, komite sekolah dan lain-lain. Dan banyaknya keterlibatan dari semua elemen masyarakat ini dapat dikatakan tingginya kemauan dari semua tingkatan elemen masyarakat untuk berperan aktif untuk kemajuan pembangunan. oleh sebab itu, musrenbang di tingkat kelurahan ini dipandang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Setokok.

B. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan Musrenbang kelurahan Setokok belumlah se-efektif dilaksanakan, baik dari segi proses maupun hasil perencanaan. Pada segi proses kurang dilakukan identifikasi masalah dan analisis wilayah untuk menentukan skala prioritas. Kurang aktifnya peserta musrenbang baik tingkat memberikan ide, tanggapan atau kritik, kurangnya nuansa demokratis dalam perencanaan dimana pihak pemerintah kelurahan masih kurang terbuka menerima saran dan dalam menetapkan alokasi dana pembangunan. Musrenbang kelurahan ini cenderung untuk hanya menyetujui program pemerintahan kelurahan. Pada aspek hasil, menunjukkan beberapa program kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta tidak ada kesinambungan antar program dan kurangnya transparan penggunaan dana bantuan.

Pernyataan tersebut disamakan oleh tokoh masyarakat bernama Asri RT 02, di samping itu menurutnya, hambatan dalam partisipasi masyarakat, RT kurang sosialisasi pada masyarakat, kadang inisiatif sendiri dari RT, tanpa melibatkan masyarakat. RT di tenggarai jarang komunikasi dengan masyarakat. Kemudian yang membuat masyarakat

kecewa program membuat gorong-gorong tidak pernah setuju, ada oknum masyarakat yang berpendapat musrenbang kelurahan itu hanya usulan saja, tidak pernah ditanggapi, musrenbang kelurahan dianggap hanya seremonial saja. Contohnya : BAS sekolah yang diusulkan sampai sekarang belum teralisasi. lampu jalan ada, hanya saja terealisasi setelah 5 tahun.

Kendala dalam program pembangunan di Kelurahan Sitokok misalnya bantuan air bersih tidak pada tempatnya, akibatnya air tidak berjalan, ada sebagian warga yang tidak mendapatkan air bersih dan anggarannya cuma-cuma, tidak tepat sasarannya kadang program pembangunan dan belum efektif dalam pelaksanaannya ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah ke depannya. Adapun bantuan dari Dinas Pekerjaan batu miring tidak berjalan efektif disebabkan pekerjaan tersebut dilakukan asal-asalan saja, yang paling penting cepat selesai, kualitasnya kurang bisa dipertanggung jawabkan dan tahan lama.

Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah kurangnya penguasaan pengetahuan atau skill yang tersedia. Dalam rangka meningkatkan efektivitas musrenbang di kelurahan Setokok maka disarankan antara lain: 1. Rekrutmen peserta musrenbang supaya lebih selektif, terutama bagi masyarakat yang memiliki kesadaran untuk mengikuti proses musrenbang, 2. Pemerintah kota perlu membuat program tersendiri untuk memberikan pelatihan perencanaan kepada setiap kelurahan, terutama Kelurahan Sitokok khususnya 3. Pendamping pada saat proses perencanaan pembangunan kelurahan dari instansi yang berkompetensi sosialisasi

petunjuk teknis perencanaan pembangunan kelurahan, pemerintah kelurahan anggota harus lebih terbuka dalam musrenbang.

Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat di Kelurahan Sitokok dapat dilihat dari 2 sisi. Sisi yang pertama yaitu faktor penghambat dilihat pada pemerintahannya sebagai pihak yang harus memberdayakan partisipasi masyarakat. Faktor-faktor penghambat lainnya akan dilihat dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi secara implementasi tidak dapat dilepaskan dari kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaannya. Oleh karenanya partisipasi dalam pengembangannya sering kali berhadapan dengan persoalan yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap sasaran dari partisipasi itu sendiri maupun pemanfaatan hasil pembangunan.

Terdapat beberapa kendala yang dapat diidentifikasi sebagai hambatan dari pelaksanaan partisipasi. Hambatan tersebut antara lain yaitu:

1. Minimnya rasa saling percaya diantara para pelaku

Kepercayaan terhadap kemauan maupun kemampuan sesama pelaku adalah merupakan basis dari dialog dan kerja sama yang akan mereka lakukan. Dengan minimnya atau bahkan tidak adanya saling percaya diantara pelaku, dapat dikatakan dari awal bahwa proses partisipasi tidak akan berdampak positif terhadap pengelolaan pembangunan. Dalam setiap kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah seharusnya mendapat dukungan dan respon dari masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam penyusunan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Perbedaan kepentingan yang tidak dapat dikompromikan

Setiap pelaku, kelompok maupun individu pasti memiliki kepentingan

sendiri-sendiri dan apabila masing-masing pelaku tidak mau ataupun mampu berkompromi dalam menyesuaikan kepentingan-kepentingan mereka, maka hal tersebut akan menghambat proses partisipasi. Kekuatan kompromi tidak bisa dipungkiri merupakan pemicu untuk saling percaya dalam program pembangunan, bagaimanapun masyarakat adalah sebagai pelaku pembangunan di lapangan, tanpa dukungan dari masyarakat maka sulit kiranya program pembangunan itu akan teralisasi.

3. Perbedaan posisi tawar (*bargaining powers*) masing-masing pelaku

Untuk mengharapkan agar dialog dan kerjasama dapat dilakukan secara demokratis dan menghasilkan konsensus yang disepakati bersama maka para pelaku harus memiliki posisi tawar yang seimbang. Adanya dominasi dari suatu kelompok atau pelaku kepada lainnya, menyebabkan manfaat dari proses partisipasi tidak akan mampu dirasakan oleh setiap pelaku.

4. Masalah Ekonomi Masyarakat

Masalah ekonomi merupakan masalah paling utama dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sitokok. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing masing kelurahan mampu mengembangkan kelurahan mereka sendiri dengan potensi yang mereka miliki, baik itu SDA (Sumber Daya Alam) maupun SDM (Sumber Daya manusia) mereka. Untuk itulah diharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah kelurahan demi terciptanya kelurahan yang maju. Dalam proses pelaksanaan musrenbang kelurahan Sitokok, kurangnya partisipasi masyarakat karena banyak waktu rapat yang berbenturan dengan persoalan ekonomi masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Al-Badri:

Masyarakat lebih mengutamakan ekonominya, itu merupakan hal yang wajar bagi masyarakat. Dilema bagi pemerintah kelurahan dalam mengatur jadwal rapat. Kalau pagi dan siang hari banyak yang nelayan, tetapi kalau ditetapkan malam akan seperti ini hasilnya. Banyak juga masyarakat yang keluar rumah waktu-waktu rapat, tetapi mereka lebih senang duduk di warung atau berkumpul dengan keluarga sehabis kerja seharian.

Selain itu permasalahan dalam musrenbang kelurahan. Pertama, pemilihan stakeholder. Dari rangkaian dialog yang dilaksanakan masih ada kelompok masyarakat yang tidak terwakili oleh stakeholder yang diundang. Selain itu beberapa stakeholder yang diundang hanya mengirimkan wakilnya, sehingga untuk mencapai kesepakatan dinilai kurang efektif.

Kedua, persiapan peserta. Peserta tidak diberikan bahan-bahan yang cukup mengenai tema yang akan dibahas, sehingga banyak peserta yang datang dengan pikiran kosong dan kesulitan mengikuti jalannya dialog. Akibatnya peserta menjadi pasif atau memberikan pendapat di luar konteks. Bahkan ada pelaksanaan dialog dalam rapat yang mengajari peserta terlebih dahulu mengenai proses perencanaan yang dibuat pemerintah, yang berakibat tidak tergalinya masukan dan pendapat dari peserta karena sibuk memahami apa itu kebijakan, program dan kegiatan.

Ketiga, dinamika kelompok. Masih terjadi dominasi pendapat dari peserta yang mempunyai pengaruh cukup besar, sehingga pendapat peserta kurang terdengar. Oleh karena itu setiap anggota kelompok sebaiknya mempunyai kedudukan setara

agar satu sama lain bebas mengemukakan pendapatnya.

Ke empat, fasilitator juga berperan sangat strategis. Pada beberapa dialog fasilitator kurang menguasai materi sehingga ia tidak dapat mengarahkan atau memformulasikan dengan benar hasil pemikiran peserta. Fasilitator sebaiknya tidak mengajari peserta, namun hanya menampung dan memformulasikan aspirasi peserta. Proporsi aliran informasi dari peserta sebaiknya lebih besar dari pada aliran informasi dari fasilitator ke peserta.

Kelima, pencapaian hasil dialog. Kadang-kadang penyelesaian hasil dialog dilakukan sendiri oleh seseorang yang dianggap kurang mampu menyelesaikannya, tanpa dibantu oleh peserta lain dan kurang didukung oleh data yang akurat. Akibatnya hasil dialog tersebut menjadi tidak optimal dan dikhawatirkan banyak melewatkan beberapa hal yang penting. Karena peserta musrenbang berganti dan arah diskusi kurang sistematis dan kurang terarah.

Dari segi teknis, ada beberapa catatan yang penting diperhatikan untuk perbaikan penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Setokok:

1. Proses partisipasi tidak boleh melupakan analisis stakeholder sebagai faktor penting pada bagian awal. Kemampuan untuk menentukan siapa saja yang harus terlibat dalam proses partisipasi sangat berpengaruh terhadap tingkat representasi dan legitimasi dari forum yang dibentuk, sehingga apa yang dihasilkan dapat berpengaruh kuat terhadap proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. Dua kriteria yang penting berkaitan dengan analisis stakeholder adalah

- memiliki informasi yang baik terhadap agenda dan concern terhadap hal tersebut.
2. Kesiapan eksekutif dan legislatif untuk mendukung dan juga terlibat dalam proses partisipasi sangat diperlukan agar tidak terjadi konflik politik yang tajam dan justru mengakibatkan proses partisipasi menjadi bumerang bagi masyarakatnya sendiri.
 3. Proses partisipasi harus dapat memberikan manfaat nyata baik secara komunal maupun individual agar semangat partisipasi dapat terjaga untuk perkembangan selanjutnya masa depan
 4. Dalam penyelenggaraan forum, peran fasilitator yang berpengalaman dan memiliki wawasan yang cukup tentang perencanaan partisipatif sangat mempengaruhi kelancaran proses diskusi dan pengambilan keputusan
 5. Semakin kecil ruang lingkup perencanaan, proses partisipasi akan dapat berlangsung lebih efektif terutama dalam kaitannya dengan proses analisis stake holder untuk menghasilkan forum yang representatif dan memiliki yang kuat
 6. Satu hal yang harus dijaga untuk selalu ada dalam proses partisipasi adalah komitmen yang kuat terhadap keputusan-keputusan yang dibuat. Jika hal ini belum dapat diciptakan, maka proses partisipasi hanya berulang sia-sia. Dalam hal ini proses partisipasi hanya membuang-buang waktu dan biaya.

Penutup

Dari hasil penelitian tentang peran partisipatif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Sitokok atau yang dikenal dengan sebutan musrenbang kelurahan sudah berjalan baik. Partisipasi masyarakat di Kelurahan Sitokok dapat disimpulkan aktif dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Keaktifan itu didorong oleh rasa kesadaran dan kebutuhan yang sama terhadap pembangunan. Proses penyebaran informasi, konsultasi dan kolaborasi diantara elemen masyarakat cukup bersinergi dalam pogram kemajuan pembangunan Kelurahan Sitokok. Hampir di setiap RW/RT Kelurahan Sitokok mengalami kebutuhan yang sama terhadap pembangunan. Dimulai dari pembangunan fisik sampai pada pembangunan manusia.

Musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Sitokok boleh dikatakan berbanding lurus dengan hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat, usulan yang diterima seperti: pembangunan seminas jalan, pelabuhan rakyat, batu miring pantai, alat tangkap ikan, sumur bor, bibit ikan dan keramba ikan, lampu penerangan jalan, puskesmas pembantu (Pustu), pagar pemakaman, pembangunan dermaga, dan lain sebagainya. Kesemua pembangunan itu adalah merupakan usulan dalam musrenbang kelurahan yang disetujui oleh pemerintah. Semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan Sitokok juga merupakan dorongan bagi masyarakat antusias terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan, hampir kesemua elemen masyarakat hadir dalam rapat musrenbang kelurahan Sitokok.

Sungguhpun pencapaian usulan masyarakat dalam musrenbang cukup terealisasi dengan optimal, namun tetap

saja target pemberdayaan masyarakat belum lah belum di katakan maksimal sesuai dengan harapan masyarakat seluruhnya. Misalnya waktu yang cukup lama dalam merealisasikan usulan masyarakat, comtohnya : seminisasi jalan dan penerangan jalan yang diusulkan tahun sekarang namun bisa terealisasi 2 atau 3 tahun lagi, termasuk air bersih dan lain sebagainya. Bisa dilihat kendala yang ditemukan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan Sitokok sebagai berikut:

1. Minimnya rasa saling percaya diantara pelaku stakeholder di Kelurahan Sitokok, ini juga terkait dengan kurang sosialisasi diantara pelau stakeholder dan kadang ada anggapan masyarakat musrenbang kelurahan ini hanya sifatnya seremonial saja.
2. Perbedaan kompromikan yang tidak dapat dikompromikan
3. Perbedaan posisi tawar (*bargaining power*) masing-masing pelaku (sulitnya untuk bulat suara dalam rapat)
4. Masalah ekonomi masyarakat, misalnya tidak dapat menghadiri rapat dikarenakan kebutuhan ekonomi yang leih urgent
5. Masalah komunikasi yang belum terlihat efektif, dimana terkadang RT berinisiatif sendiri dalam program usulan pembangunan tanpa melibatakan memperhatikan usulan masyarakat
6. Pembangunan yang tidak tepat sasaran dalam artian pembangunan yang dilakukan asal-asaan saja dan kurang memperhatikan dari segi mutu dan kualitas. Daya tahan pembangunan yang tidak memperhatikan dampak jangka waktu yang lama
7. Sekalipun Lurah Sitokok turun ke lapangan dalam meninjau pembangunan, namun tetap saja

finishingnya nanti ada di musrenbang tingkat kelurahan kota

8. Pada umumnya masyarakat berpenapat dalam pembangunan sudah cukup baik, hanya saja kadang masih banyak program yang usulan-usulan masayrakat yang sifatnya urgent akan tetapi tidak disegerakan dalam percepatan progres pembangunannya.
9. Masih terdapat kendalan pola sikap budaya yang di tenggarai penyebab hambatan dalam proses ppembangunan di masyarakat. Hambatan tersebut bisa merupakan faktor pendidikan, usia dan faktor lingkungan keamanan yang mesti diwaspadai. Faktor pengrusakan moral (Narkoba) perlu diwaspadai karena bisa menghambat program pembangunan.
10. Kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi jadi penyebab dalam pembanguan partisipasi masyarakat. Tidak lah boleh ada sifat kecemburuan, tapi dalam prakteknya ada daerahnya yang mesti diprioritaskan dalam pembangunan tapi justru daerah yang lain yang justru mendapatkan.

Dari sekian banyak kendala dan hanbatan yang ditemukan dalam lapangan, bukan berarti pembangunan di Kelurahan tidak dikatakan berhasil, kendal dan masalah itu sesuatu yang wajar dalam membanguan bahkan pencapaian pemerintah Kelurahan Sitokok perlu diapresiasi dalam rangka meningkataka pmebnguanan msayarakat di Kelurahan Sitokok.

Saran

1. Keterbukaan dan komitmen dari pelaku pemerintahan kelurahan Sitokok tidak saja memberikan dukungan moral, tapi betul-betul aktif terlibat dalam gerak langkah forum. Keterbukaan dari pihak

pemerintah kelurahan ini telah menciptakan atmosfer yang memberikan rasa aman kepada stakeholder lain untuk berani berpendapat tanpa merasa takut pada efeknya.

2. Dukung pihak luar yang terdiri atas komponen LSM dan terutama perguruan tinggi yang memiliki akses terhadap informasi, keahlian dan dana (walaupun dukungan dana bukan faktor yang signifikan). Dukungan dalam bentuk fasilitasi proses-proses partisipatori barang kali adalah kontribusi terbesar yang diberikan oleh pihak pendukung dari luar. Dengan melibatkan komponen LSM dan Perguruan tinggi dapat bekerja sama dalam riset/penelitian. Dengan adanya kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah kelurahan, komponen LSM dan perguruan tinggi ini akan menambah khasanah dalam progres pembangunan di Kelurahan Sitokok

Daftar Pustaka

- Abe, Alexander, (2005). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pembaharuan. Jakarta
- Adi, Isbandi Rukminto, (2001). *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Interoensi Komunitas*. Lembaga Penelitian FE-UI. Jakarta
- Adisasmata Raharjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu. Yogyakarta
- Adi, Isbandi Rukminto, (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UI Press. Depok
- Bagong, Suyanto dan Sutinah, (2006). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*. Prenada Media Group. Jakarta
- Huraerah, Abu. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Humaniora. Bandung
- Ife, Jim dan Tesorieso F. (2008). *Community Development, Alternatif Pengembangan masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Mardalis. (2006). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta
- Said, Mas'ud, (2005). *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang
- Soetomo. (2008). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sumaryadi, I Nyoman, (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Citra Utama. Jakarta
- Sunarti. (2003). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*. Jurnal Tata Loka. Planologi UNDIP. Semarang

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional